

Posisi Indonesia Pada Organisasi Internasional: Peran Strategis Dalam Pembentukan Hukum Internasional

Levina Yustitiningtyas¹, L.Ya Esty Pratiwi², Dewi Setyowati³

Abstract

International law functions as a foundation for relations between states and international organizations, and regulates various global issues such as human rights, peace and security. Indonesia, as the country with the fourth largest population and one of the main regional powers in Southeast Asia, plays a significant role in the development of international law. This legal writing focuses on the issue of the extent of Indonesia's contribution in participating in international organizations, and its role in drafting and implementing international legal norms. Indonesia has made many contributions to the international arena, namely in forming international agreements and global conventions, such as the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and the Kyoto Protocol. The legal writing method used is legal normative, with a conceptual approach and case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this legal writing provide an answer that Indonesia has also implemented international legal norms into its national law and Indonesia's position or role in various international activities has been taken into account. This shows that Indonesia not only functions as an active participant in international policy making, but also as a driver of significant change in advancing the principles of international law. This contribution not only strengthens Indonesia's position on the global stage but also helps shape a fairer and more inclusive international legal order.

Keyword : international law, Indonesia, international organizations

Abstrak

Hukum internasional berfungsi sebagai landasan bagi hubungan antara negara dan organisasi internasional, serta mengatur berbagai isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat dan salah satu kekuatan regional utama di Asia Tenggara memainkan peran signifikan dalam perkembangan hukum internasional. Penulisan hukum ini memfokuskan permasalahan tentang sejauhmana kontribusi Indonesia dalam partisipasinya pada organisasi internasional, dan peran dalam penyusunan dan penerapan norma-norma hukum internasional. Kontribusi Indonesia dalam kancah internasional telah banyak dilakukan yaitu dalam membentuk perjanjian internasional dan konvensi global, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dan Protokol Kyoto. Metode penulisan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penulisan hukum ini memberikan jawaban bahwa Indonesia juga telah mengimplementasikan norma-norma hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya dan posisi atau peran serta Indonesia dalam berbagai kegiatan internasional telah diperhitungkan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai peserta aktif dalam pembuatan kebijakan internasional, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang signifikan dalam memajukan prinsip-prinsip hukum internasional. Kontribusi ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah global tetapi juga membantu membentuk tatanan hukum internasional yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci : hukum internasional, Indonesia, organisasi internasional

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi yang melampaui 270 juta jiwa, memiliki posisi strategis dalam komunitas internasional. Dalam konteks global, peran Indonesia dalam berbagai organisasi internasional sangat signifikan, terutama dalam pembentukan hukum internasional. Posisi ini berakar pada sejarah panjang diplomasi, kebijakan luar negeri

¹ Levina Yustitiningtyas, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, email: levinayustitiningtyas@um-surabaya.ac.id

² L.Ya Esty Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, email: l.ya.esty.pratiwi@um-surabaya.ac.id

³ Dewi Setyowati, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, email: dewi.setyowati@hangtuah.ac.id

yang aktif, serta keterlibatan dalam berbagai forum internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memainkan peran yang signifikan dalam kancah internasional. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah aktif dalam upaya diplomasi internasional. Sebagai negara yang mengusung prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak pada blok politik manapun dan berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional. Prinsip ini tercermin dalam partisipasi aktif Indonesia dalam organisasi internasional dan regional.

Dalam era globalisasi, hubungan antarnegara semakin kompleks dan dinamis. Negara-negara di seluruh dunia semakin terintegrasi melalui berbagai organisasi internasional yang berfungsi sebagai platform untuk kerjasama dan penyelesaian sengketa, serta pembentukan norma dan hukum internasional. Indonesia, dengan posisi geografis dan politiknya yang strategis, memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan hukum internasional. Indonesia menjadi anggota berbagai organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada hukum internasional dan kebijakan global. Contoh nyata adalah ketika Indonesia berhasil mengukuhkan sebagai negara kepulauan dan konsep negara kepulauan tersebut telah diterima oleh masyarakat internasional pada konferensi Hukum Laut yang dituangkan pengaturannya dalam *United Nations Convention On The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982.⁴

Sebagai negara yang terletak di persimpangan jalur perdagangan global dan memiliki populasi besar serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam pembentukan hukum internasional. Posisi ini memberikan Indonesia peluang untuk mempengaruhi dan memformulasikan aturan yang akan mengatur hubungan internasional, perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan keamanan global. Indonesia juga aktif dalam menyuarakan isu-isu penting seperti perubahan iklim, keamanan maritim, dan pembangunan berkelanjutan, yang mencerminkan kepentingan nasionalnya sekaligus kontribusinya terhadap hukum internasional. Dalam forum-forum internasional, Indonesia berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan standar internasional yang berhubungan dengan berbagai isu global.

Namun, peran strategis Indonesia dalam pembentukan hukum internasional tidak tanpa tantangan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan antara lain; keseimbangan kepentingan nasional dan internasional, dimana Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan kewajiban internasionalnya. Ini bisa menjadi tantangan ketika kepentingan nasional bertentangan dengan norma internasional atau ketika harus berkompromi dengan negara-negara lain. Hubungan diplomatik juga menjadi isu yang perlu diperhatikan, meskipun Indonesia memiliki posisi strategis, pengaruh diplomatiknya dalam organisasi internasional seringkali terbatas oleh kapasitas sumber

⁴ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

daya dan keterampilan diplomasi yang ada. Isu internal dan kebijakan eksternal berpengaruh terhadap dinamika politik dan kebijakan domestik juga dapat mempengaruhi efektivitas dan konsistensi posisi Indonesia dalam forum internasional. Kompleksitas dalam pembentukan Hukum internasional menjadi isu yang terakhir, dimana proses pembuatan hukum internasional melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Indonesia harus dapat mengontrol kompleksitas ini dan mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika global.

Memahami posisi dan peran Indonesia dalam organisasi internasional serta kontribusinya terhadap pembentukan hukum internasional adalah penting untuk merumuskan strategi diplomasi yang lebih efektif. Penelitian ini memfokuskan permasalahan tentang sejauhmana peran Indonesia sebagai negara anggota organisasi internasional dalam pembentukan hukum internasional dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di tingkat internasional.

Rumusan Masalah

Peran dan posisi Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembentukan hukum internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif⁵, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan mengkaji peran negara sebagai anggota organisasi internasional. Pendekatan berikutnya yang dipakai adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji peran dan keaktifan Indonesia dalam penyelesaian beberapa kasus di tingkat internasional. Bahan hukum yang dipakai adalah menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan hukum nasional maupun internasional, bahan hukum sekunder yaitu berupa buku refrensi, jurnal dan artikel terkait tema yang diambil dalam penulisan hukum ini. Berikutnya bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum tersier⁶ yaitu berupa berita-berita atau data yang diambil dari website atau internet.

Pembahasan

Posisi Indonesia dalam Organisasi Internasional

Menurut Boer Mauna, organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negeri yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ dari perhimpunan itu sendiri.⁷ Kemudian menurut Bowet memberikan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Ce (Jakarta: Kencana - Depok, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&lpq=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010).

⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Pe (Bandung: Alumni, 2000).

batasan definisi organisasi internasional, bahwa, tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya.⁸ Menurut Sumaryo Suryokusumo, Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.⁹

Dapat disimpulkan bahwa, organisasi internasional merupakan perkumpulan yang terbentuk dan didukung oleh beberapa negara sesuai dengan kemauan mereka, dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dunia dalam konteks hubungan internasional. Organisasi internasional umumnya anggotanya terdiri dari negara-negara, tetapi terdapat pula kesempatan bagi entitas lain untuk mengajukan keanggotaan, baik negara maupun entitas lain ini berperan dalam pembuatan hukum internasional dan tunduk pada peraturannya.¹⁰ Organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi Kerjasama antara negara-negara anggotanya serta mencegah konflik yang dapat menjadi semakin intens. Selain itu, organisasi internasional juga menjadi tempat yang ideal untuk melakukan perundingan dan mencapai keputusan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Lebih lanjut, organisasi internasional juga berfungsi sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan.¹¹

Indonesia merupakan negara dengan posisi yang strategis dalam organisasi internasional. Indonesia mulai membuka hubungan diplomatik sejak meneguhkan posisinya sebagai negara Merdeka dengan berbagai negara dan aktif menjadi anggota di beberapa organisasi internasional baik di tingkat global maupun tingkat regional Asia Tenggara. Keterlibatan Indonesia dalam politik bebas aktif memiliki korelasi yang erat dengan visi, misi, dan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, serta peran negara ini dalam kancah internasional. Untuk memahami korelasi tersebut secara mendalam, perlu ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari sejarah, nilai-nilai ideologis, hingga implementasinya dalam diplomasi internasional.

Politik bebas aktif berakar pada pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea keempat yang menyatakan tujuan Indonesia untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Prinsip ini juga sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Oleh karena itu, keterlibatan

⁸ DW BOWETT and Bambang Iriana Jayaatmaja, *Hukum Organisasi Internasional*, ed. Bambang Iriana Jayaatmadja, cetakan 1 (Jakarta, 1992).

⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, cetakan 1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990).

¹⁰ Z Carissa Adelia, A Auroria Salsabila, and Sari Putri Tiara, "Peran Organisasi Internasional Di Dalam Suatu Negara," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 121–26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347>.

¹¹ Adelia, Salsabila, and Tiara.

Indonesia dalam politik bebas aktif merefleksikan komitmen moral untuk mendukung tatanan dunia yang damai dan adil. Dalam praktiknya, politik bebas aktif diwujudkan melalui berbagai inisiatif diplomasi dan partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional, berikut beberapa organisasi internasional yang telah diikuti oleh Indonesia:

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah berperan dalam berbagai organ PBB, termasuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan berbagai badan khusus seperti UNCTAD dan UNHCR. Peran Aktif pada organisasi dunia ini yaitu Indonesia telah menyumbangkan pasukan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB, terlibat dalam perumusan berbagai resolusi, dan mendukung berbagai program pembangunan serta bantuan kemanusiaan. Salah satu kontribusi penting Indonesia adalah dalam pembentukan dan implementasi hukum internasional terkait hak asasi manusia dan lingkungan.¹²

b. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Sebagai salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967, Indonesia memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pengembangan kerangka kerja regional. Indonesia telah berperan aktif hingga saat ini dalam mengembangkan kebijakan dan perjanjian regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Selain itu, Indonesia memainkan peran penting dalam isu-isu seperti keamanan maritim dan penanggulangan bencana.

c. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Indonesia bergabung dengan OKI pada tahun 1969. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki peran strategis dalam mengarahkan agenda OKI dan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam forum internasional. Indonesia berkontribusi pada pembentukan resolusi dan kebijakan yang berhubungan dengan konflik di negara-negara Muslim serta isu-isu global lainnya.¹³

d. G20

Indonesia menjadi anggota G20 pada tahun 1999, dan perannya semakin menonjol setelah menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun 2022. Indonesia menggunakan platform G20 untuk mempromosikan agenda global terkait pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan reformasi sistem keuangan internasional.¹⁴

Beberapa organisasi internasional yang diikuti Indonesia menunjukkan perannya dalam arah pembentukan hukum internasional baik dalam bidang penyusunan dan pengesahan perjanjian internasional yang melibatkan berbagai aspek, termasuk peran aktif

¹² Kementerian Luar Negeri, "The United Nation In Indonesia," 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/95/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.

¹³ Kementerian Luar Negeri, "Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," Kemlu, 2022, https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki.

¹⁴ Kementerian Luar Negeri, "G-20," 2014, https://kemlu.go.id/portal/id/read/137/halaman_list_lainnya/g-20.

Indonesia dalam forum internasional, diplomasi, serta pengaruhnya terhadap pengembangan hukum internasional. Berikut adalah beberapa peran Indonesia dalam masyarakat internasional:

a. Peran dalam Forum Internasional

Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, G20, dan forum-forum regional lainnya, yang seringkali memainkan peran sebagai mediator atau fasilitator dalam perundingan internasional, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan regional, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga telah mengusulkan berbagai inisiatif dan resolusi yang kemudian diterima dalam forum internasional. Misalnya, Indonesia memainkan peran penting dalam pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

b. Peran dalam Penyusunan Perjanjian Internasional

Indonesia sering terlibat dalam proses negosiasi perjanjian internasional, baik sebagai anggota negara atau sebagai bagian dari kelompok negara tertentu. Misalnya, dalam perundingan tentang perubahan iklim, Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kesepakatan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia membawa keahlian dan pengalaman unik dalam isu-isu kelautan dan lingkungan hidup. Kontribusi Indonesia dalam perjanjian internasional seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan nasional serta tantangan spesifik yang dihadapinya. Dalam bidang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah berkontribusi dalam perumusan berbagai konvensi internasional terkait HAM, termasuk Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.¹⁵

Setelah perjanjian internasional disepakati, Indonesia melalui proses domestik untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Proses ini melibatkan badan legislatif seperti DPR dan pemeriksaan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan kesesuaian dengan hukum nasional. Setelah ratifikasi, Indonesia juga berusaha untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian internasional dalam kebijakan dan peraturan nasional. Implementasi ini melibatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan.

c. Peran Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional

Peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sangat penting. Melalui partisipasi dalam misi perdamaian, diplomasi multilateral, dan upaya mediasi, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas global. Selain itu, fokus pada isu-isu perubahan iklim dan penguatan kapasitas

¹⁵ Misbahul Munir, M. Wasith Achadi, and Nurdhin Baroroh, "Peran Generasi Z Dalam Paradigma Geopolitik Indonesia," *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 20858–68, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6215>.

nasional semakin memperkuat posisinya sebagai aktor kunci dalam masyarakat internasional. Dengan terus menjalin kerja sama dan dialog, Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan dunia yang aman dan damai. Beberapa bentuk kontribusi yang telah dilakukan Indonesia, diantaranya:¹⁶

a) Kontribusi dalam Misi Perdamaian PBB

Indonesia aktif berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak mengirimkan pasukan pertamanya pada tahun 1957, Indonesia telah mengirimkan ribuan personel militer dan polisi ke berbagai misi di berbagai negara, seperti Kongo, Lebanon, dan Sudan Selatan. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global dan penegakan hukum internasional.

b) Diplomasi Multilateral

Indonesia memanfaatkan platform multilateral seperti ASEAN, G-20, dan PBB untuk mempromosikan dialog dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks ASEAN, Indonesia berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di kawasan, termasuk yang melibatkan Myanmar dan isu-isu Laut Cina Selatan.

c) Peran sebagai Mediator

Indonesia telah berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik, baik di tingkat regional maupun internasional. Misalnya, Indonesia berhasil memediasi konflik di Aceh melalui MoU Helsinki yang membawa perdamaian setelah bertahun-tahun konflik. Keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang dapat dipercaya dalam peran diplomatik.

d) Kepemimpinan dalam Isu-isu Global

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, juga berperan dalam dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme. Melalui forum seperti "Bali Democracy Forum," Indonesia mendorong kerjasama untuk menciptakan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

e) Keterlibatan dalam Isu Perubahan Iklim

Stabilitas global juga terkait erat dengan isu lingkungan. Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian internasional untuk menangani perubahan iklim, yang berdampak pada keamanan manusia. Dengan menjadi salah satu negara yang terkena dampak perubahan iklim, Indonesia berupaya untuk mempromosikan solusi yang berkelanjutan.

f) Penguatan Kapasitas Nasional

Selain berperan di tingkat internasional, Indonesia juga terus memperkuat kapasitas nasional dalam bidang keamanan dan pertahanan. Ini termasuk meningkatkan kemampuan militer dan lembaga keamanan untuk

¹⁶ Gunawan Santoso et al., "Kajian Keikutsertaan Indonesia Dalam Organisasi Internasional Untuk Perdamaian Dunia Di Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023): 157–70.

menangani ancaman domestik yang dapat berdampak pada stabilitas internasional.

Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai anggota aktif PBB dan negara anggota ASEAN, Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian, diplomasi, dan penyelesaian konflik. Melalui pendekatan multilateral dan kerjasama regional, Indonesia mempromosikan dialog, toleransi, dan penyelesaian damai. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara menjadikannya sebagai mediator yang kredibel dalam konflik internasional. Dengan berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan penguatan masyarakat sipil, Indonesia tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian global.

Peran Strategis Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Internasional

Indonesia, sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara dan termasuk anggota G20, memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan hukum internasional. Sejarah, geopolitik, serta budaya yang kaya menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci dalam berbagai forum internasional. Artikel ini akan membahas peran strategis Indonesia dalam pembentukan hukum internasional, termasuk kontribusi dalam organisasi internasional, diplomasi multilateral, dan upaya menjaga stabilitas regional. Dalam bidang diplomasi, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan G20. Dalam konteks PBB, Indonesia telah berperan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan mengusung berbagai isu penting, termasuk perdamaian dan keamanan global. Melalui ASEAN, Indonesia berperan sebagai pemimpin dalam mendorong kerjasama ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki pengalaman yang kaya dalam diplomasi perdamaian. Sebagai negara yang pernah mengalami konflik internal, Indonesia memahami pentingnya dialog dan negosiasi.

Peran Indonesia dalam mediasi konflik di Timor Leste, Aceh, dan berbagai negara lain di Asia Tenggara menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas regional dan global. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Pengaruh Indonesia dalam penyelesaian konflik internasional terlihat dalam berbagai upaya yang telah dilakukan, diantaranya Indonesia berusaha menyelesaikan konflik dengan dialog dan diplomasi sebagai pencerminan negara yang menganut prinsip non-intervensi. Keterlibatannya dalam berbagai upaya penyelesaian konflik di negara-negara tetangga, seperti di Myanmar dan Filipina. Indonesia mengedepankan pendekatan yang menghormati kedaulatan negara lain. Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara negara-negara yang berkonflik, terutama di kawasan Asia Tenggara. Misalnya, dalam konteks konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia berusaha menjadi mediator antara negara-negara yang bersengketa.

Pendekatan yang dilakukan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang netral dan dapat dipercaya. Indonesia juga mengedepankan nilai-nilai budaya, seperti gotong royong dan musyawarah, dalam penyelesaian konflik. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan penghargaan terhadap perbedaan dapat membantu menciptakan pemahaman dan kepercayaan antar pihak yang berkonflik.

Peran Indonesia selanjutnya dalam bidang lingkungan hidup adalah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk berperan aktif dalam isu-isu lingkungan hidup di kancah internasional. Melalui Konferensi Perubahan Iklim, Indonesia memperjuangkan perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Kebijakan Indonesia dalam pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam upaya menjaga lingkungan. Dalam bidang maritim, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam perumusan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dengan memanfaatkan posisi geografisnya sebagai negara kepulauan untuk memperkuat klaim dan kebijakan maritimnya. Indonesia juga berperan dalam diskusi global mengenai pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan laut. Dalam isu-isu tentang perubahan iklim, Indonesia berkomitmen pada perjanjian internasional mengenai perubahan iklim sebagai implementasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Negara ini aktif dalam negosiasi internasional untuk mengurangi emisi karbon dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi serta adaptasi iklim.

Sebagai salah satu roda ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar dalam diplomasi ekonomi. Indonesia berperan aktif dalam meningkatkan kerjasama ekonomi melalui berbagai perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Keanggotaan Indonesia dalam G20 memungkinkan negara ini untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. Peran strategis Indonesia dalam menjalin hubungan internasional juga terlihat dari upaya promosi budaya. Melalui program pertukaran budaya dan pendidikan, Indonesia berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman antar budaya. Diplomasi budaya ini tidak hanya memperkuat hubungan dengan negara lain tetapi juga menciptakan citra positif Indonesia di mata dunia.

Secara keseluruhan, pengaruh Indonesia dalam penyelesaian konflik internasional sangat signifikan. Melalui diplomasi aktif, pengalaman dalam penyelesaian konflik, dan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, Indonesia menunjukkan bahwa negara besar tidak hanya berperan sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Dengan mengedepankan dialog dan kerja sama, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai negara yang mendukung penyelesaian konflik secara damai.

Dapat dikatakan bahwa peran strategis Indonesia dalam pembentukan hukum internasional sangat signifikan. Dengan pendekatan yang inklusif, Indonesia mampu berkontribusi dalam berbagai isu global, mulai dari perdamaian, lingkungan, hingga ekonomi. Komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam diplomasi multilateral dan penyelesaian konflik menjadikannya sebagai aktor kunci dalam menciptakan dunia yang lebih stabil dan sejahtera. Ke depannya, Indonesia diharapkan terus memperkuat perannya di masyarakat internasional sebagai perwujudan dalam ikut memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Partisipasinya di Organisasi Internasional

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam berperan serta dalam organisasi internasional untuk pembentukan hukum internasional. Menghadapi keterbatasan sumber daya, menjaga keseimbangan kepentingan, dan meningkatkan partisipasi serta

koordinasi adalah langkah penting untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat global. Indonesia harus dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan global. Dalam banyak kasus, ada perbedaan antara apa yang diinginkan oleh negara dan apa yang dianggap perlu oleh komunitas internasional, yang dapat menyebabkan konflik dalam pembentukan hukum internasional. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia juga dapat menghambat partisipasi aktif dalam perumusan hukum internasional serta dalam mengajukan kepentingan nasional yang relevan. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan lainnya harus dioptimalkan, tantangan muncul ketika Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar.

Perubahan geopolitik yang cepat dan kompleksitas hubungan internasional menambah tantangan bagi Indonesia. Negara harus beradaptasi dengan posisi yang berubah, yang dapat memengaruhi pengaruhnya dalam proses perumusan hukum internasional. Ada beberapa kendala yang dihadapi Indonesia untuk menjawab berbagai tantangan dalam tingkat internasional, diantaranya:¹⁷

a) Antara Kepentingan Nasional dan Tuntutan Global

Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan global. Dalam banyak kasus, ada perbedaan antara apa yang diinginkan oleh negara dan apa yang dianggap perlu oleh komunitas internasional, yang dapat menyebabkan konflik dalam pembentukan hukum internasional.

b) Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum internasional di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Edukasi tentang pentingnya hukum internasional dapat membantu dalam advokasi dan pengaruh Indonesia dalam organisasi internasional.

c) Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah di Indonesia yang berhubungan dengan hukum internasional kadang kurang efektif. Perlu ada mekanisme yang lebih baik untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri dan hukum internasional dapat diintegrasikan dengan baik.

Berada di kawasan yang sering mengalami ketegangan, seperti hubungan dengan negara-negara di Laut China Selatan, membuat Indonesia sering mengalami ketegangan mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional. Munculnya rivalitas antara kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan China, menempatkan Indonesia dalam posisi sulit.¹⁸ Indonesia harus dapat menjaga hubungan diplomatik dengan bijak tanpa terjebak dalam konflik kepentingan. Isu-isu terorisme dan hak asasi manusia menjadi fokus global, dan Indonesia seringkali berada di bawah sorotan terkait isu-isu tersebut. Meskipun Indonesia

¹⁷ Humas Setkab, "Peluang Dan Tantangan Dalam Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional Peluang Dan Tantangan Dalam Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional," Setkab, 2022, <https://setkab.go.id/peluang-dan-tantangan-dalam-pemanfaatan-keanggotaan-indonesia-pada-organisasi-internasional/>.

¹⁸ rctiplus, "Perselisihan Di Laut Cina Selatan Meningkat, Filipina Serukan Pengusiran Diplomat China," Jakarta, 2024, <https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/4363088/perselisihan-di-laut-cina-selatan-meningkat-filipina-serukan-pengusiran-diplomat-china>.

memiliki pengalaman dalam menangani terorisme, ancaman ini masih ada dan memerlukan perhatian yang terus-menerus. Negara harus mampu menanggapi kritik dan menyusun kebijakan yang sejalan dengan norma-norma internasional, sambil tetap menjaga kepentingan nasional.

Secara geografis Indonesia yang terletak di jalur perdagangan internasional strategis terutama di Selat Malaka, memberikan posisi yang strategis peluang untuk menjadi hubungan perdagangan dan logistik di Asia Tenggara. Dengan memperkuat infrastruktur dan konektivitas Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing, sehingga keuntungan bagi Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin inisiatif integrasi ekonomi dan politik di kawasan, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki berbagai kesempatan untuk memperkuat posisi diplomatik dan ekonominya melalui pemanfaatan posisi geografis, kerjasama regional, pengembangan sumber daya, dan inovasi.¹⁹ Dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik di kancah global. Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki potensi untuk memimpin dan memperkuat kerjasama regional. Melalui inisiatif seperti *ASEAN Economic Community* (AEC), Indonesia dapat mempromosikan integrasi ekonomi dan meningkatkan daya saing bersama negara-negara anggota. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara besar seperti AS, China, dan Jepang. Kerjasama di bidang perdagangan, teknologi, dan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keikutsertaan dalam forum multilateral seperti G20 memberikan peluang untuk memperkuat peran Indonesia di kancah global.²⁰

Indonesia negara dengan pengalaman dalam menghadapi tantangan Pembangunan dapat membagikan praktik terbaik dan inovasi kepada negara lain. Kesadaran akan pentingnya kerja sama multilateral semakin mendesak, terutama di tengah isu-isu global yang kompleks. Dengan memanfaatkan keunggulan geografis dan budaya, Indonesia tidak hanya dapat memperkuat posisi di masyarakat internasional, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya solusi yang berkelanjutan dan inklusif dalam hubungan internasional. Upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum internasional di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan juga merupakan faktor kunci untuk keberhasilan Indonesia di masa depan.

Kesimpulan

Indonesia memainkan peran penting dalam berbagai organisasi internasional, posisinya yang aktif dalam forum-forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan G20 mencerminkan komitmennya terhadap penyelesaian isu-isu global, termasuk perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keamanan internasional. Peran

¹⁹ Wiwiek Rukmi Dwi Astuti and Laode Muhamad Fathun, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo," *Intermestic: Journal of International Studies* 5, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>.

²⁰ Astuti and Fathun.

strategis Indonesia terlihat dari upayanya dalam menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan maju, serta dalam mempromosikan nilai-nilai multilateral dan solidaritas. Indonesia juga berkontribusi pada pembentukan hukum internasional, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, dan penyelesaian sengketa secara damai. Dengan pendekatan diplomasi yang baik, Indonesia tidak hanya meningkatkan citranya di masyarakat internasional tetapi juga berperan dalam menciptakan norma-norma hukum yang lebih adil dan berkelanjutan bagi komunitas internasional. Ke depan, Indonesia diharapkan dapat terus memperkuat peran ini dan mengatasi tantangan global dengan kebijakan yang proaktif dan kolaboratif.

Daftar Pustaka

- Adelia, Z Carissa, A Auroria Salsabila, and Sari Putri Tiara. "Peran Organisasi Internasional Di Dalam Suatu Negara." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu S Osial* 1, no. 6 (2024): 121-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347>.
- Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi, and Laode Muhamad Fathun. "Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." *Intermestic: Journal of International Studies* 5, no. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- BOWETT, DW, and Bambang Iriana Jayaatmaja. *Hukum Organisasi Internasional*. Edited by Bambang Iriana Djajaatmadja. Cetakan 1. Jakarta, 1992.
- Humas Setkab. "Peluang Dan Tantangan Dalam Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional Peluang Dan Tantangan Dalam Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional." Setkab, 2022. <https://setkab.go.id/peluang-dan-tantangan-dalam-pemanfaatan-keanggotaan-indonesia-pada-organisasi-internasional/>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi, Ce. Jakarta: Kencana - Depok, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&lpq=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Cetakan Pe. Bandung: Alumni, 2000.
- Munir, Misbahul, M. Wasith Achadi, and Nurdhin Baroroh. "Peran Generasi Z Dalam Paradigma Geopolitik Indonesia." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 20858-68. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6215>.
- Negeri, Kementerian Luar. "G-20," 2014. https://kemlu.go.id/portal/id/read/137/halaman_list_lainnya/g-20.
- — —. "Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)." Kemlu, 2022. https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki.
- — —. "The United Nation In Indonesia," 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/95/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.
- rctiplus. "Perselisihan Di Laut Cina Selatan Meningkat, Filipina Serukan Pengusiran Diplomat China." Jakarta, 2024. <https://www.rctiplus.com/news/detail/berita->

utama/4363088/perselisihan-di-laut-cina-selatan-meningkat--filipina-serukan-pengusiran-diplomat-china.

Santoso, Gunawan, Aim Abdulkarim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, and Ma Murod. "Kajian Keikutsertaan Indonesia Dalam Organisasi Internasional Untuk Perdamaian Dunia Di Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023): 157–70.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2010.

Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Organisasi Internasional*. Cetakan 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.